

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertanian merupakan salah satu sektor penting sebagai penghasil devisa terbesar kedua setelah sektor migas dan memberikan kontribusi yang signifikan dalam perekonomian nasional. Pada tahun 2022, sektor pertanian memiliki kontribusi sebesar 12,40% (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian masih menjadi tulang punggung perekonomian, khususnya di wilayah pedesaan. Sebagai sektor yang strategis, pembangunan pertanian menjadi perhatian utama pemerintah dalam rangka meningkatkan produksi dan kesejahteraan petani. Pengembangan pertanian bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi produksi, serta taraf hidup petani yang lebih baik (Rochaeni, 2014). Dalam upaya tersebut, pemerintah telah mengimplementasikan berbagai kebijakan, seperti subsidi input produksi, kebijakan harga, serta pembenahan kelembagaan pangan. Salah satu kebijakan penting dalam subsidi input produksi adalah subsidi pupuk (Kholis dan Setiaji, 2020).

Pupuk merupakan salah satu faktor produksi utama dalam usahatani selain lahan, tenaga kerja, dan modal. Pemberian pupuk bertujuan untuk memenuhi kebutuhan unsur hara tanaman sehingga dapat meningkatkan hasil produksi. Kekurangan penggunaan pupuk dapat menyebabkan penurunan produktivitas pertanian, sehingga keberadaan pupuk menjadi sangat penting bagi petani (Ashari et al., 2019). Berdasarkan sistem pengadaan dan penyalurannya, pupuk dibedakan menjadi pupuk bersubsidi dan pupuk non-subsidi. Pupuk bersubsidi merupakan pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapatkan subsidi dari pemerintah, sedangkan pupuk non-subsidi tidak mendapatkan subsidi dan mengikuti mekanisme pasar. Kebijakan subsidi pupuk di Indonesia telah diterapkan sejak tahun 1970-an dan terus mengalami penyempurnaan, termasuk melalui sistem distribusi tertutup (Zulaiha, 2018).

Dalam konteks pembangunan agribisnis, program pupuk bersubsidi memiliki peran penting dalam meningkatkan produktivitas pertanian. Program ini dirancang untuk memberikan akses pupuk dengan harga terjangkau sehingga dapat

meningkatkan hasil produksi dan pendapatan petani. Keberhasilan program pupuk bersubsidi juga berdampak pada ketahanan pangan, stabilitas ekonomi pertanian, serta pemerataan kesejahteraan petani (Edo dan Yuliani, 2015). Oleh karena itu, pemerintah terus melakukan pengaturan terkait sistem penyediaan, distribusi, harga, dan aspek teknis lainnya guna meningkatkan efisiensi penggunaan pupuk.

Subsidi pupuk diberikan dengan tujuan untuk mempermudah petani dalam memperoleh pupuk sesuai dengan kebutuhan, meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani, serta mendukung pencapaian swasembada pangan nasional (Valeriana dan Supriyati, 2014). Dalam pelaksanaannya, penyaluran pupuk bersubsidi diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 249/KPTS/SR.320/M/04/2024 yang menekankan prinsip enam tepat (6T), yaitu tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat tempat, dan tepat mutu. Prinsip ini menjadi indikator utama dalam menilai efektivitas penyaluran pupuk bersubsidi.

Proses penyaluran pupuk bersubsidi diawali dengan penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), yaitu dokumen yang berisi kebutuhan pupuk petani yang disusun melalui musyawarah kelompok tani bersama penyuluh pertanian. RDKK menjadi dasar dalam perencanaan pengadaan dan distribusi pupuk bersubsidi secara berjenjang mulai dari tingkat kelompok tani hingga pemerintah pusat. Mekanisme ini bertujuan untuk memastikan bahwa penyaluran pupuk bersubsidi tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan petani.

Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) merupakan dasar rencana pengadaan dan pelayanan dari GAPOKTAN yang disusun berdasarkan musyawarah anggota Kelompok Tani yang meliputi rencana kebutuhan sarana produksi pertanian, alat mesin pertanian untuk satu musim/siklus usaha. Berdasarkan Juknis Pelaksanaan Penyediaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi ada tiga tahapan dalam pelaksanaan dan penyusunan RDKK, yaitu sebagai berikut: (1) melakukan pertemuan antara pengurus kelompok dengan penyuluh pertanian untuk persiapan penyusunan RDKK; (2) pertemuan anggota kelompok tani beserta ketua kelompok tani dengan penyuluh pertanian untuk menyusun daftar kebutuhan pupuk anggota kelompok tani; (3) meninjau kembali kelengkapan RDKK lalu RDKK ditandatangani oleh ketua kelompok tani yang diketahui oleh penyuluh pertanian.

Setelah melakukan penyusunan tersebut, kelompok tani menyampaikan hasilnya ke Balai Penyuluhan Pertanian (BPP). RDKK tersebut dikirimkan kepada Pengecer (Kios) atau Gapoktan yang bertindak sebagai pengecer resmi dan selanjutnya rekapitulasi usulan kebutuhan pupuk tersebut dikirimkan kepada Distributor. Rekapitulasi kebutuhan pupuk dari distributor dikirimkan kepada Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dan selanjutnya secara berjenjang diserahkan kepada Dinas Pertanian Provinsi dan Kementerian Pertanian (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2011).

Seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022, pada pertengahan tahun 2022 terjadi perubahan dalam jenis pupuk bersubsidi yang disediakan jika sebelumnya terdapat lima jenis pupuk yang disubsidi yaitu Urea, SP36, Phonka NPK, ZA dan Organik dipangkas menjadi Urea dan NPK saja. Serta stok pupuk yang tersedia di kios pengecer dapat di salurkan hingga bulan September setiap tahunnya dan komoditas yang disubsidi hanya 9 jenis saja yang mana sebelumnya lebih dari 60 jenis, pemilihan 9 komoditas ini didasarkan pada kebutuhan pangan pokok dan komoditas strategis yang berdampak terhadap inflasi. Adapun komoditas yang mendapatkan pupuk bersubsidi yaitu padi, jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, cabai, tebu, kopi dan kakao. Tujuan dari diterbitkannya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 ini yaitu untuk mengoptimalkan penyaluran pupuk bersubsidi bagi para petani dan meminimalkan adanya penyelewengan terhadap harga dan distribusi pupuk subsidi. Hal ini berdampak positif terhadap ketersediaan dan stabilitas harga pupuk subsidi.

Meskipun demikian, dalam implementasinya program pupuk bersubsidi masih menghadapi berbagai permasalahan, seperti kelangkaan pupuk, keterlambatan distribusi, ketidaksesuaian harga dengan Harga Eceran Tertinggi (HET), serta ketidaksesuaian antara kebutuhan dan alokasi pupuk yang diterima petani. Oleh karena itu, evaluasi terhadap efektivitas program pupuk bersubsidi menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana program tersebut telah berjalan sesuai dengan prinsip enam tepat (Ramlayana et al., 2020). Efektivitas penggunaan pupuk bersubsidi diarahkan pada pemupukan berimbang dan organik sesuai rekomendasi spesifik lokasi atau standar teknis penggunaan pupuk yang dianjurkan. Penerapan pemupukan berimbang perlu didukung dengan aksesibilitas

dalam memperoleh pupuk dengan harga yang terjangkau (Kementerian Pertanian, 2020). Dengan meneliti efektivitasnya, dapat diidentifikasi apakah alokasi dana subsidi telah memberikan dampak positif yang diharapkan, seperti peningkatan hasil tanaman dan kesejahteraan petani yang mana hal ini nantinya akan berpengaruh terhadap berjalannya 5 subsistem agribisnis.

Dalam sistem agribisnis, pupuk merupakan bagian dari subsistem hulu yang memiliki keterkaitan erat dengan subsistem lainnya, seperti produksi, pemasaran, dan kelembagaan. Ketidakefektifan dalam penyediaan pupuk dapat mengganggu keseluruhan sistem agribisnis dan berdampak pada penurunan produktivitas serta kesejahteraan petani. Oleh karena itu, kajian mengenai efektivitas program pupuk bersubsidi menjadi penting dalam mendukung pembangunan pertanian yang berkelanjutan.

Kabupaten Pasaman Barat merupakan salah satu daerah di Provinsi Sumatera Barat yang memiliki potensi besar di sektor pertanian dan menjadi salah satu penerima alokasi pupuk bersubsidi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasaman Barat tahun 2023, Kabupaten Pasaman Barat merupakan salah satu sentra produksi jagung dengan luas panen mencapai 5.835 hektar dan produksi sebesar 37.813 ton di Kecamatan Kinali. Hal ini menunjukkan bahwa komoditas jagung memiliki peran penting dalam perekonomian daerah, sehingga kebutuhan terhadap pupuk menjadi sangat krusial dalam mendukung produktivitas.

Salah satu wilayah sentra produksi jagung di Kecamatan Kinali adalah Nagari Ampek Koto. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasaman Barat (2023), Kecamatan Kinali memiliki luas panen jagung sebesar 5.835 hektar dengan total produksi mencapai 37.813 ton, yang merupakan salah satu yang tertinggi di Kabupaten Pasaman Barat. Tingginya produksi tersebut menunjukkan bahwa aktivitas usahatani jagung di wilayah ini sangat intensif dan membutuhkan dukungan sarana produksi, khususnya pupuk.

Selain itu, Kabupaten Pasaman Barat juga merupakan salah satu daerah penerima alokasi pupuk bersubsidi dalam jumlah yang cukup besar di Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan data dari Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat (2022), alokasi pupuk bersubsidi di wilayah ini mencapai puluhan ribu ton setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa

ketergantungan petani terhadap program pupuk bersubsidi di daerah ini cukup tinggi.

Namun demikian, tingginya alokasi pupuk bersubsidi tidak selalu diiringi dengan kelancaran distribusi di tingkat petani. Berdasarkan survei pendahuluan, masih ditemukan berbagai permasalahan di Nagari Ampek Koto, seperti kelangkaan pupuk di tingkat pengecer, ketidaksesuaian harga dengan Harga Eceran Tertinggi (HET), serta jumlah pupuk yang diterima tidak sesuai dengan kebutuhan yang diajukan dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Kondisi ini mengindikasikan adanya potensi ketidakefektifan dalam pelaksanaan program pupuk bersubsidi di tingkat lokal.

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat bahwa meskipun program pupuk bersubsidi memiliki peran penting dalam mendukung sektor pertanian, masih terdapat berbagai permasalahan dalam implementasinya di tingkat lapangan. Oleh karena itu, diperlukan penelitian untuk menganalisis prosedur pelaksanaan serta mengevaluasi efektivitas program pupuk bersubsidi berdasarkan indikator enam tepat di Nagari Ampek Koto, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai kinerja program pupuk bersubsidi serta menjadi bahan evaluasi dalam perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran di masa yang akan datang.

B. Rumusan Masalah

Jagung merupakan komoditas strategis dalam pengembangan agribisnis di Indonesia karena tidak hanya berperan sebagai sumber pangan, tetapi juga sebagai bahan baku utama industri pakan ternak, bioenergi, dan berbagai produk turunan lainnya. Pengembangan agribisnis jagung berpotensi meningkatkan pendapatan petani, menciptakan lapangan kerja, serta mendukung ketahanan pangan dan energi nasional.

Kabupaten Pasaman Barat merupakan salah satu daerah penerima alokasi pupuk bersubsidi di Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan data dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pasaman Barat, Untuk Kabupaten Pasaman Barat sendiri pada tahun 2025 menerima sebanyak 19.447. ton urea dan 18.753 NPK. Pupuk yang telah dialokasikan tersebut diabgikan ke setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Pasaman Barat. Kecamatan Kinali menerima pupuk urea sebanyak

3496 ton dan pupuk NPK sebanyak 3232 ton. Selain itu, berdasarkan Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasaman Barat (2023), Kecamatan Kinali merupakan salah satu sentra produksi jagung dengan luas panen mencapai 5.835 hektar dan produksi sebesar 37.813 ton, sehingga kebutuhan terhadap pupuk sangat tinggi. Jika dibandingkan dengan kecamatan lain di Kabupaten Pasaman Barat, Kecamatan Kinali merupakan daerah dengan luas panen tertinggi jika dibandingkan dengan 10 kecamatan yang ada di Kabupaten Pasaman Barat.

Sebagai salah satu wilayah sentra produksi jagung, petani di Nagari Ampek Koto sangat bergantung pada pupuk bersubsidi untuk menekan biaya produksi. Namun, berdasarkan survei pendahuluan, masih ditemukan berbagai permasalahan dalam penyaluran pupuk bersubsidi, seperti ketidaksesuaian harga dengan Harga Eceran Tertinggi (HET), kelangkaan pupuk di tingkat pengecer. Kondisi ini diperkuat dengan data Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 yang menunjukkan bahwa alokasi pupuk bersubsidi mengalami penyesuaian kuota, di mana alokasi awal pupuk Urea sebesar 117.322 ton direalokasi menjadi 111.610 ton, dan alokasi NPK dari 130.643 ton direalokasi menjadi 125.597 ton. Adanya keterbatasan dan penyesuaian alokasi pupuk bersubsidi tersebut memicu potensi kelangkaan dan keterlambatan distribusi di tingkat petani, sehingga belum sepenuhnya mampu memenuhi total usulan kebutuhan yang diajukan.

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa tujuan program pupuk bersubsidi, yaitu untuk mempermudah akses petani terhadap pupuk, meningkatkan produktivitas, serta meningkatkan kesejahteraan petani, belum sepenuhnya tercapai. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi terhadap efektivitas program pupuk bersubsidi, khususnya berdasarkan Peraturan Presiden No.15 tahun 2011 tentang pupuk bersubsidi dalam pengawasan harus memperhatikan prinsip 6 tepat, yaitu tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat tempat, dan tepat mutu sehingga penelitian ini akan melihat prosedur pelaksanaan dan keefektifan penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani jagung di Nagari Ampek Koto, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat.

Berdasarkan uraian diatas, maka timbul pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan program subsidi pupuk di Nagari Ampek Koto, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat?
2. Bagaimana efektivitas program subsidi pupuk berdasarkan indikator 6 tepat yaitu tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat tempat dan tepat waktu di Nagari Ampek Koto, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka perlu dilakukan penelitian tentang **“Analisis Efektivitas Program Pupuk Bersubsidi Bagi Petani Jagung Di Nagari Ampek Koto Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat”**.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan, tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Mendeskripsikan prosedur pelaksanaan program subsidi pupuk kepada petani jagung di Nagari Ampek Koto, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat
2. Menganalisis efektivitas program subsidi pupuk bagi petani jagung terhadap indikator tepat harga, jumlah, waktu, tempat, mutu dan jenis di Nagari Ampek Koto, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan masukan bagi pihak-pihak terkait diantaranya adalah :

1. Bagi petani, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas program subsidi pupuk bagi petani khususnya petani jagung di Kabupaten Pasaman Barat.
2. Bagi mahasiswa, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan gagasan serta informasi yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi penelitian lain yang berkaitan dengan penelitian ini.
3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah untuk merumuskan kebijakan subsidi pupuk yang paling efektif dalam mendukung sector pertanian.